

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Anti monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Alum Simbolon. et. al, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021)

Andi Fahmi. et.al., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*, Indonesia, (Jakarta:

KPPU 2009)

A.Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987)

Harjono Dhaniswara K. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada)

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2008)

Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial*

Negara Kesejahteraan Indonesia, (Jakarta: PT Kompas, 2018)

Lubis, A. F., et. al., *Hukum persaingan usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)

M. Yahya Harahap, *ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, (Jakarta: PT

Gramedia, 1989)

Pamadi Sarkadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1984)

Antoni, V., “Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di

Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 1, 2019,
DOI:

<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1942>

Amin, A.P. Analisis Pengaruh Tarif Penerbangan, Jumlah Penerbangan Dan Pendapatan

Perkapita Dalam Meningkatkan Jumlah Penumpang. *Jurnal Bisnis STRATEGI*, Vol.

22 No. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.26740/jim.v9n4.p1592-1600>

Dewantara, R., “Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia.”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014,
DOI:

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>

Emya Pratidina Sembiring, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, Vol. 1, DOI:
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.51>

Gloria Damaiyanti Sidauruk, “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1, Januari 2021.

Fence Wantu, Peran Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan

Di Peradilan

Perdata, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, hal. 68-69.

Mustika Sari, “Kartel dan Tarif Tiket Perusahaan Penerbangan Terhadap Persaingan Usaha

Penerbangan di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)*, Vol. 6 No. 2, Mei, 2020,

DOI: [10.54324/j.mbtl.v6i2.525](https://doi.org/10.54324/j.mbtl.v6i2.525)

Mujiono, D. I. K., “Tantangan Industri Penerbangan Indonesia Menujua ASEAN Open Sky

Policy”, *Jurnal Interdependence*, Vol. 3, No. 1.

Mashur Malaka, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha,” *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2,

2014.

Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Poerwanto, E. dan Maudzoh, U. “Analisis Kecelakaan Penerbangan di Indonesia untuk

Peningkatan Keselamatan Penerbangan”. Jurnal Angkasa, Vol. 7 No. 2, 2018.

Soelasih, Y. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kewajaran Tarif terhadap Nilai Konusmen serta Retensi Pelanggan unutm Penerbangan Domestik Niaga Full Services di Indonesia”, Kinerja, Vol. 18 No. 1, 2014.

Sandy Ekki, “Analisis Yuridis Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 Terhadap Pengenaan

Sanksi Pelaporan Tertulis Jasa Angkutan Udara”, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 2, No. 1, 2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU Telah Panggil Tujuh Maskapai, Batik Air Tidak Hadir”, <https://kppu.go.id/blog/2024/04/kppu-telah-panggil-tujuh-maskapai-batik-airtidak-hadir/>, diakses pada 29 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/saing>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan

Usaha, 2017), hal. 24.

Tyler, T. (2015). Developing the Potential of Indonesia's Aviation Sector.

Retrieved 15 November 2019, from <https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-03-12-01.aspx>, diakses pada 29 April 2024

Sylke Febrina Laucereno, “Kementerian BUMN: Harga Avtur Sudah Turun Sejak November

2018”, <https://finance.detik.com/energi/d-4424485/kementerian-bumn-harga-avtur-sudah-turunsejaknovember-2018>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

Wahyudi Aulia Siregar, “MA Kabulkan Kasasi KPPU Terkait Kartel Tiket Pesawat Domestik dari Tujuh Maskapai”, <https://www.idxchannel.com/economics/ma-kabulkan-kasasi-kppu-terkaitkartel-tiket-pesawat-domestik-dari-tujuh-maskapai>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

Anggela, N. L. (2023). *TikTok dituding Lakukan Monopoli, idEA: Yang Berhak Menentukan KPPU*. Jakarta: Bisnis.com.

Hayati, N. A. (2021). “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Jure*.

Komisi VI DPR RI. (2021). *Penguatan Lembaga KPPU Harus disegerakan*. Jakarta.

Li, S., & Xie, C. (2017). Rise of the Machines: Emerging Antitrust Issues Relating to Algoritm Bias and Automation. *SSRN Electron*.

McKenzie, R. B., & Lee, D. R. (2001). How Digital Economics Revises Antitrust Thinking. *Antitrust Bull*, 253-298.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram.

Primandhika, M. P. (2019). “*Analisis Penerapan Pendekatan Rule Aofa Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia*”. I Gede Artha, kerthaa semaya.

- Putra, A. S. (2021). Hukum Persaingan 4.0: Issu Big Data, Artificial Intelligence dan Blockchain dalam Konteks Hubungan PersainganUsaha di Era Industri Ekonomi Digital. *Dharmasisya*, 1136.
- Rohmat. (2022). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 118-126.
- Sabirin, & Herfian, R. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 75-82.
- Sogol, D., & Roisin, C. E. (2016). Antitrust and Regulating Big Data. *Univ Florida Levin Coll*, 1141-1142.
- Sumadi, P. S. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA*. Hukum Acara Persaingan Usaha.
- Zainudin, & Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Suinar Grafika